

ABSTRAK

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Indonesia mengakui bahwa menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat namun faktanya kebebasan itu belum sepenuhnya diberikan kepada seluruh rakyat. Keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan hukum merupakan suatu keadilan. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media social (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna) dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Berdasarkan putusan perkara nomor 432/Pid.Sus/2019/Pn.Bna, Terdakwa Saiful Mahdi dinyatakan bersalah atas Pencemaran Nama Baik terhadap Taufiq Saidi tetapi berdasarkan penelitian Terdakwa Saiful Mahdi hanya melakukan kritik belaka terhadap suatu system penerimaan CPNS. Hal tersebut membuat implementasi UU ITE kerap dianggap sebagai pasal karet dan membungkam kebebasan ekspresi.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial. UU ITE, Kebebasan Berekspresi

ABSTRACT

The freedom to express thoughts and opinions orally and in writing belongs to all Indonesian people. Indonesia recognizes that expressing thoughts and opinions orally and in writing, freedom of expression and freedom of the press are basic rights that must be enjoyed by all levels of the people, but the fact is that these freedoms have not been fully granted to all people. Decisions that contain the truth, are impartial, can be accounted for and treat every human being on the same position before the law are justice. The writing of this scientific paper uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach. This study aims to determine criminal liability for defamation through social media (Case Study Decision Case Number: 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna) and analyze the judge's legal considerations in deciding criminal cases of Defamation through Social Media. Based on the decision number 432/Pid.Sus/2019/Pn.Bna, the Defendant Saiful Mahdi was found guilty of Defamation of Taufiq Saidi but based on the Defendant's research, Saiful Mahdi only criticized a CPNS acceptance system. This makes the implementation of the ITE Law often considered a rubber article and silences freedom of expression.

Keyword : Defamation, Social Media, ITE, Freedom of Speech.